



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUYUN ESTRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA PROGRAM STUDI S1 PTM
3. NHK : 806018

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.144.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 444.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 346.000.000

1. MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 782.000.045



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	229.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.571.000.045
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.571.000.045

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.